

**PENTINGNYA PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PADA
KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SULUT**

TUGAS AKHIR

Oleh
Swingly Syalomika Rumerung
NIM : 20051060



POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI BISNIS
2024

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	vii
BIOGRAFI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Perumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Pengembangan Administrasi.....	9
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	14

3.2 Jenis dan Metode Penelitian.....	14
3.2.1 Jenis Penelitian	14
3.2.2 Metode Penelitian.....	16
3.3 Jenis Data dan Prosedur Pengumpulan Data	17
3.3.1 Jenis Data.....	17
3.3.2 Metode Pengumpulan Data	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	19
4.1 Gambaran Umum Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan SULUT	19
4.1.1 Logo.....	19
4.1.2 Sejarah.....	20
4.1.3 Visi dan Misi.....	21
4.1.4 Struktur Organisasi.....	22
4.2 Hasil Penelitian.....	28
4.3 Pembahasan.....	28
BAB V PENUTUP.....	31
5.1 Kesimpulan.....	31
5.2 Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan di Wilayahnya menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Daerah. perkembangan industri Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu sektor ekonomi utama dan sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat. Pada era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, pengembangan administrasi yang efisien dan efektif di DKP Provinsi Sulawesi Utara menjadi sangat penting. Pengembangan administrasi yang baik akan memberikan dampak positif secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti aspek hukum, kebijakan, pelayanan publik, pengawasan, dan pengendalian.

Salah satu alasan pentingnya pengembangan administrasi pada DKP Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan adanya administrasi yang baik, proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Informasi yang tepat waktu dan akurat ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang cerdas dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, pengembangan administrasi yang baik juga akan memberikan manfaat dalam hal penyusunan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan. Melalui administrasi yang efektif, DKP Provinsi Sulawesi Utara dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis kondisi kelautan dan perikanan, termasuk potensi, tantangan, dan risiko yang dihadapi. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang tepat guna dalam rangka pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan laut.

Selain itu, pengembangan administrasi yang baik juga akan membantu meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh DKP Provinsi Sulawesi Utara kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Administrasi yang efisien akan mempermudah proses perizinan, pengurusan dokumen, dan layanan lainnya yang berhubungan dengan sektor ini. Dengan demikian, para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan mereka secara lebih lancar dan efektif, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan administrasi yang baik pada DKP Provinsi Sulawesi Utara juga akan memberikan manfaat dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program di sektor kelautan dan perikanan. Administrasi yang terorganisir dengan baik, akan memungkinkan adanya pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program di sektor kelautan dan perikanan. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, DKP Provinsi Sulawesi Utara dapat melakukan pengawasan secara

rutin terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

Administrasi yang terorganisir juga akan memudahkan pengendalian terhadap alokasi sumber daya dan anggaran yang tersedia. DKP Provinsi Sulawesi Utara dapat mengelola dan memanfaatkan anggaran dengan lebih efisien, menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan sektor kelautan dan perikanan.

Dalam konteks pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara, pengembangan administrasi yang baik juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan sinergi antara DKP dengan stakeholder terkait, seperti lembaga pemerintah lainnya, universitas, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Administrasi yang efektif akan mempermudah koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara berbagai pihak, sehingga dapat terbentuk kerjasama yang sinergis dalam mengatasi berbagai permasalahan dan mencapai tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang yang semakin kompleks di sektor kelautan dan perikanan, pengembangan administrasi yang baik bagi staf karyawan di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara menjadi sangat penting. Hal ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi pengelolaan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam sektor kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, staf karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara kurang paham dalam administrasi, untuk melakukan pengembangan administrasi yang terus-menerus dan berkelanjutan. dalam pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan penyusunan kebijakan yang mendukung administrasi yang efektif bagi staf karyawan.

Dalam melanjutkan pengembangan administrasi pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, beberapa Solusi dapat dilakukan:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf DKP dalam hal administrasi, manajemen kepegawaian, manajemen keuangan, pengelolaan data, dan penerapan teknologi informasi. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan yang diberikan
2. Penggunaan Teknologi Informasi yang Canggih: Menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi seperti pengelolaan data elektronik, basis data terintegrasi, sistem informasi manajemen, dan aplikasi berbasis web untuk mempermudah akses dan pertukaran informasi antara unit kerja di DKP dan dengan stakeholder eksternal. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan Big Data Analytics juga dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis data yang lebih efektif.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan Stakeholder: Membangun kerjasama yang erat dengan lembaga pemerintah terkait, universitas, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam bentuk forum diskusi, konsultasi, dan kolaborasi proyek. Ini akan memperluas jaringan informasi, sumber daya, dan pemahaman tentang isu-isu terkini dalam sektor kelautan dan perikanan, serta mendorong sinergi dalam pengembangan administrasi yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam semua aspek administrasi, termasuk pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, dan pelaporan. Menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan evaluasi kinerja secara rutin untuk memastikan bahwa setiap kegiatan administratif sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Pembangunan Kebijakan yang Mendukung: Membuat dan memperbarui kebijakan yang mendukung pengembangan administrasi yang efektif dan efisien, termasuk kebijakan tentang penggunaan teknologi informasi, manajemen kepegawaian, perencanaan anggaran, dan pengawasan. Melibatkan para ahli dan praktisi terkait dalam penyusunan kebijakan untuk memastikan keterkaitan yang erat antara kebijakan dan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan volume pekerjaan dan tuntutan administrasi yang semakin

kompleks akibat pesatnya pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara.

1. Sistem administrasi yang tidak efektif di kantor dinas dapat mempersulit pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif.
2. Ketidadaan integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam administrasi perkantoran dapat menyebabkan proses menjadi lambat, mempersulit akses data, dan mengganggu pengambilan keputusan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identitas masalah yang telah dijelaskan di atas, perumusan masalah yang relevan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi administrasi saat ini di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengembangan administrasi di kantor dinas tersebut?
3. Bagaimana pengaruh pengembangan administrasi yang tepat terhadap efektivitas dan efisiensi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut?
4. Bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas administrasi di kantor dinas tersebut?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengembangan administrasi di kantor dinas tersebut.
- b. Menganalisis kondisi administrasi saat ini di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut.
- c. Mengevaluasi potensi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan kualitas administrasi di kantor dinas tersebut.
- d. Menganalisis pengaruh pengembangan administrasi yang tepat terhadap efektivitas dan efisiensi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut.

Manfaat Penelitian:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi administrasi saat ini di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut.
- b. Menyediakan informasi tentang hambatan yang dihadapi dalam pengembangan administrasi di kantor dinas tersebut, sehingga
- c. Memberikan pemahaman tentang pengaruh pengembangan administrasi yang tepat terhadap efektivitas dan efisiensi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut.
- d. Membahas potensi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan kualitas administrasi di kantor dinas tersebut.
- e. Memberikan rekomendasi dan solusi untuk pengembangan administrasi yang lebih baik di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut.

- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Sulut melalui pengembangan administrasi yang lebih baik.

